

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



**Pemaparan Bahan Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas
Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Dan
Efektivitas Pelayanan Fungsi Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum NTB**

NAMA	: Arya Sutha Narwadi
NIP	: 199203042010121002
JABATAN	: Pranata Keuangan APBN Mahir
SATUAN KERJA	: Kanwil Nusa Tenggara Barat

**PELATIHAN IMPACTFUL COMMUNICATION BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA
TENGAH TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Umum

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan publik. Salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan audit adalah pemeriksaan pendahuluan, yang menjadi fondasi bagi pemeriksaan yang lebih mendalam dan terfokus. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai entitas yang diperiksa, ruang lingkup kegiatan, sistem pengendalian internal, serta potensi risiko yang dapat memengaruhi penyajian informasi keuangan dan operasional. Dalam tahap ini, tim pemeriksa melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis, permasalahan sistemik, dan indikator awal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang mencakup:
 - PSP 100: Standar Umum
 - PSP 200: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan
 - PSP 300: Standar Pelaporan Pemeriksaan

Peraturan ini menetapkan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara independen, objektif, dan profesional, serta berdasarkan

2. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), diselenggarakan kegiatan Entry Meeting sebagai forum koordinasi awal antara tim pemeriksa BPK RI dan pihak-pihak terkait di Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan ruang lingkup dan strategi pemeriksaan awal yang akan dilakukan pada dua aspek utama, yaitu: kepatuhan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja pelayanan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Melalui Entry Meeting ini, BPK RI menjelaskan maksud pemeriksaan pendahuluan sebagai upaya memperoleh pemahaman awal terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pelayanan publik, mengidentifikasi potensi risiko, serta menilai efektivitas sistem pengendalian internal di lingkungan entitas yang diperiksa. Hasil kegiatan ini akan menjadi landasan bagi pemeriksaan terinci yang lebih mendalam, fokus, dan berbasis risiko. Selain itu, Entry Meeting menjadi wadah untuk membangun sinergi dan keterbukaan antara tim auditor dan entitas yang diaudit, sehingga proses pemeriksaan berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemeriksaan untuk Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Pengelolaan BMN periode sampai dengan 30 Juni 2025 dengan sasaran Efektivitas desain dan implementasi SPI dalam pengelolaan BMN dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan BMN. Sedangkan untuk Efektivitas Layanan AHU ruang lingkupnya adalah Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya pada Ditjen AHU yang meliputi layanan fidusia, badan hukum dan kenotariatan untuk

tahun 2024 dan Semester I 2025 dengan sasaran Proses bisnis, sistem pengendalian internal yang dibangun oleh entitas, peraturan terkait PNBPN Lainnya pada Ditjen AHU yang meliputi layanan fidusia, badan hukum dan kenotariatan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pada hari tersebut, Saya sebagai moderator acara menyampaikan rangkaiannya kegiatan rapat internal terkait Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2025 dan Efektivitas Pelayanan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan saat pemeriksaan. Kepala Kantor Wilayah juga menekankan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, beliau mengimbau seluruh pihak agar bersikap kooperatif, informatif, responsif, serta tepat waktu dalam pemenuhan data, dokumen, maupun kehadiran personel, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung baik, lancar, efektif, dan efisien.

Setelah rapat internal, kegiatan dilanjutkan dengan entry meeting bersama Kepala Biro Keuangan dan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam paparan tersebut, Wakil Penanggung Jawab II menyampaikan beberapa poin penting:

1. Tujuan entry meeting adalah memastikan adanya komunikasi yang efektif dan efisien sepanjang proses pemeriksaan. Dengan komunikasi yang baik, hasil pemeriksaan dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab maupun pemangku kepentingan terkait.
2. Ruang lingkup pemeriksaan:
 - Untuk Kepatuhan Pengelolaan BMN, pemeriksaan mencakup periode hingga 30 Juni 2025 dengan sasaran efektivitas desain dan implementasi SPI, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Untuk Efektivitas Layanan AHU, ruang lingkungannya meliputi pengelolaan PNBPN Lainnya (fidusia, badan hukum, dan kenotariatan) pada Ditjen AHU tahun anggaran 2024 dan Semester I 2025, dengan sasaran efektivitas proses bisnis, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait PNBPN.
3. Sampling pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Pusat dan Daerah, dengan jadwal di NTB pada tanggal 8–13 Juli 2025 untuk audit BMN, serta tanggal 10–13 Juli 2025 untuk Efektivitas Layanan AHU.

C. Hasil yang dicapai

Dari hasil rapat internal dan kegiatan *entry meeting*, dapat saya sampaikan hasil yang dicapai yakni:

1. Untuk kepatuhan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), menyiapkan data2 terkait pengelolaan aset dimasa-masa transisi pemisahan Kementerian, utamanya aset yang digunakan secara sementara oleh masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, Kanwil Ditjen PAS NTB dan Kanwil Kementerian HAM NTT wilayah kerja NTB.
2. Untuk kinerja pelayanan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) T.A 2024 dan T.A. 2025 s.d 30 Juni 2025, dari Bidang AHU menyiapkan data dalam bentuk softcopy dan untuk Bagian Tata Usaha dan Umum khususnya subbagian Keuangan menyiapkan data pertanggungjawaban atas penggunaan anggarannya.

D. Simpulan dan saran

Atas kegiatan yang telah dilaksanakan , dapat saya simpulkan yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat akan menyiapkan data dukung yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pemeriksaan baik itu Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara maupun Efektivitas Layanan Administrasi Hukum Umum. Karena atas pemeriksaan pendahuluan ini dapat menjadi bahan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Kemudian hal-hal yang dapat saya saran atas kegiatan ini adalah, diperlukannya menghadirkan pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab pekerjaan mengingat akan melaksanakan koordinasi kepada Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, Kanwil Ditjen PAS NTB dan Kanwil Kementerian HAM NTT wilayah kerja NTB.

E. Penutup

Dapat saya sampaikan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Entry Meeting dan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk

terus meningkatkan sinergi, transparansi, serta efektivitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan pelayanan fungsi Administrasi Hukum Umum. Laporan ini diharapkan menjadi gambaran awal terhadap kesiapan dan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh untuk mendukung pemeriksaan mendalam yang akan datang.

Dengan semangat profesionalisme dan akuntabilitas, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga komunikasi yang terbuka dan responsif, guna menciptakan proses pemeriksaan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi tata kelola keuangan negara dan pelayanan publik. Semoga kegiatan ini menjadi pondasi kuat bagi peningkatan kinerja dan kredibilitas institusi ke depan.

Dikeluarkan di Mataram

Pada tanggal 01 September 2025

Mengetahui,

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum,

Alumni



Arya Sutha Narwadi



Muhammad Amin Imran

DOKUMENTASI KEGIATAN

